

**STRATEGI PERTAHANAN LAUT  
PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM  
MARINE DEFENSE STRATEGY  
THE GOVERNMENT OF INDONESIA IN KEEPING MARITIME SECURITY**

Kuncoro Arry Prasetyo<sup>1</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>2</sup>, Dohar Sianturi<sup>3</sup>

Strategi Pertahanan Laut Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan  
[kuncoroarryprasetyo@gmail.com](mailto:kuncoroarryprasetyo@gmail.com)

**Abstrak** - Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki wilayah laut terbuka dan keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menimbulkan kerawanan-kerawanan terhadap berbagai kemungkinan ancaman maritim. Sudah selayaknya pemerintah Indonesia menjadikan keamanan maritim sebagai prioritas dalam kebijakan maritim yang dikeluarkan. Tulisan ini akan menganalisa strategi pertahanan laut pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan maritim dengan menggunakan teori-teori strategi pertahanan laut dan keamanan maritim. Metoda penulisan yang dilaksanakan menggunakan deskriptif kualitatif studi pustaka. Penulis selanjutnya akan merumuskan tentang strategi pertahanan laut pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan maritim agar dapat optimal melalui pendekatan keras dan pendekatan lunak. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya keamanan maritim di Indonesia sehingga Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo masih ditemukan adanya kendala. Sebagai kesimpulan bahwa Keamanan maritim bisa dilakukan dengan cara pendekatan keras dan pendekatan lunak dimulai dengan penetapan sebuah Doktrin Maritim, pembentukan Maritim Domain Awareness (MDA), dan pembangunan kekuatan laut (*Sea power*) untuk tercapainya tujuan pertahanan dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

**Kata Kunci:** *Keamanan Maritim, Doktrin Maritim, Maritime Domain Awareness, Sea Power, hard effort, soft effort*

**Abstract** -Indonesia as an archipelagic country has an open sea area and the existence of the Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) which creates vulnerabilities to various possible maritime threats. It is appropriate for the Indonesian government to make maritime security a priority in its maritime policies. This paper will analyze the Indonesian government's marine defense strategy in maintaining maritime security by using strategic theories of maritime defense and maritime security. The writing method used is descriptive qualitative literature study. The next writer will formulate the Indonesian government's marine defense strategy in maintaining maritime security so that it can be optimal through a hard approach and a soft approach. The results showed that maritime security in Indonesia was not optimal yet, so that the World Maritime Axis proclaimed by President Joko Widodo still found obstacles. As a conclusion, maritime security can be carried out by means of a hard approach and a soft approach starting with the establishment of a Maritime Doctrine, the formation of Maritime Domain Awareness (MDA), and the sea power building (*Sea power*) to achieve defense objectives in

---

<sup>1</sup>Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup>Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup>Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

maintaining and protecting state sovereignty, territorial integrity. NKRI and the safety of the entire nation from all forms of threats.

**Keywords:** Maritime Security, Maritime Doctrine, Maritime Domain Awareness, Sea Power, hard effort, soft effort

## Pendahuluan

Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan panjang garis pantai sepanjang 108.000 km<sup>2</sup> dan dikelilingi oleh luas perairan yang mencapai 6.400.000 km<sup>2</sup> dan luas daratan 1.900.000 km<sup>2</sup>. Berarti Indonesia sebagai negara kepulauan yang 2/3 dari keseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari perairan dan berdasarkan letak geografisnya, perairan Indonesia adalah salah satu kawasan perairan tropis yang berdaya dukung alam tinggi dengan kemampuan mega biodiversity, sehingga kondisi ini tentu saja akan menarik keinginan negara-negara atau pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mencoba mengelolanya secara legal maupun ilegal yang dalam pemanfaatannya dapat merugikan dan membahayakan lingkungan maritim<sup>4</sup>.

Perikanan merupakan sektor yang sangat berpotensi untuk menghasilkan

devisa di negeri ini. Begitu pula dengan Laut Indonesia, mengandung potensi ekonomi dan modal pembangunan yang sangat besar dan beragam. Apabila optimal dalam pendayagunaan sumber daya laut, maka potensi ini akan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam menyejahterakan rakyat di negeri ini. Meskipun PDB Perikanan masih kecil, namun kontribusinya terhadap PDB nasional terus meningkat dari 2,8% di tahun 2008 menjadi 3,2 di tahun 2013. Selain itu, selama 2010-2012, pertumbuhannya selalu di atas 6%<sup>5</sup>. Selain kaya akan berbagai jenis ikan, dasar laut wilayahnya menyimpan ribuan bahan tambang. Dengan posisi yang strategis, wilayah laut Indonesia menjadi bagian dari jalur transportasi laut dunia dan juga berpotensi besar untuk pengembangan wisata bahari. Wilayah Indonesia adalah persimpangan bagi kapal dari dunia barat yang ingin ke timur dan

---

<sup>4</sup>Antonius Widyoutomo, "Pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim Indonesia", *Jurnal Maritim*, Vol.1, No.1., Februari 2020, hlm.2.

<sup>5</sup>Kementerian Perdagangan, "Laporan Akhir Analisis Kebijakan Impor Ikan Dan Produk Perikanan", *Jurnal Maritim*, Vol.1, No.1., September 2014, hlm.2.

kapal dunia timur yang ingin ke barat.

Selain itu, Kebijakan membentuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadikan Indonesia sebagai negara ‘terbuka’. Hingga kini, berbagai pelayaran dan penerbangan asing dengan bebas berlalu lalang memotong wilayah Indonesia. Ancaman keamanan pada tiga jalur ALKI menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam menuju cita-cita poros maritim<sup>6</sup>.

Wilayah laut Indonesia sangat berpengaruh terhadap pengamanan wilayah darat, jika keamanan laut sudah diperkuat maka segala kegiatan ilegal akan bisa dijaga di laut sehingga tidak masuk ke wilayah daratan. Kondisi ini pula menjadikannya rawan akan ancaman dari pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kekayaan laut di Indonesia. Kejahatan di laut di Indonesia antara lain adalah *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Selain itu, keamanan laut juga terganggu akibat banyaknya imigran gelap yang berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan dengan tujuan

Australia untuk mencari suaka politik melalui wilayah perairan Indonesia. Bersamaan dengan masuknya imigran gelap ini diikuti dengan masuknya isu lainnya seperti penyakit menular, penyelundupan barang, narkoba dan manusia, bahkan terkait dengan kelompok teroris<sup>7</sup>. Isu keamanan lainnya yang mengancam keamanan maritim Indonesia adalah kasus pembajakan dan perompak.

Terjadinya gangguan yang terjadi di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi laut Indonesia yang paling utama yaitu terhadap gangguan pelayaran penumpang serta barang. Pengertian tindak pidana di laut adalah tindak pidana yang hanya bisa terjadi di laut saja dan tidak bisa terjadi di darat, dibedakan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut. Tindak pidana di laut terdiri dari Tindak Pidana Perompakan/ Pembajakan di Laut, Tindak Pidana Perikanan, Tindak Pidana Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam di Dasar Laut, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Tindak Pidana Pelayaran, Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Hayati dan

---

<sup>6</sup>Ismah Rustam, “Tantangan ALKI Dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”, *Jurnal Indonesian Perspective*, Vol.1. No.1., Januari-Juni 2016, hlm.1.

<sup>7</sup>Dindya Sisca Prahenti, “Dampak Singgahnya Pencari Suaka Ke Australia Terhadap Ancaman Keamanan Non-Tradisional Bagi Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*, Vol.1., No.1., Desember 2013, hlm.1.

Ekosistemnya, Tindak Pidana Kepabeanan, Tindak Pidana Kehutanan, Tindak Pidana Keimigrasian, Tindak Pidana Penambangan Pasir Laut, Tindak Pidana Pelanggaran wilayah (Tanpa Security Clearance), Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Tindak Pidana Senjata Api dan Bahan Peledak, Tindak Pidana di ZEE Indonesia, Tindak Pidana Terorisme. tindak pidana di laut yaitu perbuatan melawan hukum yang terjadi diwilayah laut maupun diwilayah perairan yang memiliki karakter berbedabeda di setiap perbuatannya<sup>8</sup>.

Ancaman kejahatan maritim di Indonesia diperkirakan akan terus bertambah, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di perairan Indonesia. Apalagi ke depannya pusat perdagangan dunia akan lebih terfokus ke wilayah Asia, mengingat jumlah penduduk Asia yang semakin meningkat. Ancaman – ancaman ini selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga berdampak pada citra Indonesia di dunia Internasional. Indonesia harus mulai berbenah demi mewujudkan laut yang aman bagi semua,

---

<sup>8</sup>Iwan Setiawan, “Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.4. No.1., Maret 2016, hlm.1.

apalagi dengan digaungkannya visi Poros Maritim Dunia, tentunya keamanan maritim menjadi prioritas jika ingin mewujudkan visi tersebut<sup>9</sup>. Oleh karena itu, kebijakan keamanan wilayah laut menjadi salah satu fokus setiap pemerintahan Indonesia

Salah satu tujuan Pemerintahan Jokowi adalah menjadikan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di dalam rangka mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, upaya-upaya Indonesia melalui pengembangan ekonomi berbasis maritim guna untuk terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Selama ini, Indonesia kehilangan banyak sekali peluang ekonomi. Lebih khusus, ide Poros Maritim ini merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan keterjangkauan antar pulau di Indonesia. Tujuan akhir dari konektivitas ini adalah pemerataan pembangunan ekonomi dan terciptanya keamanan maritim di Indonesia<sup>10</sup>.

<sup>9</sup>Prima Tegar Anugerah, “Maritime Security and Maritime Power Concept”, *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol.4. No.1., Oktober 2017, hlm.1

<sup>10</sup>M. Najeri Al Syahrin, “Kebijakan Poros Maritim Jokowi Dan Sinergitas Strategi Ekonomi Dan

Untuk mewujudkan poros maritim dunia, keamanan laut adalah hal yang mutlak selain pemanfaatan letak geografis wilayahnya.

### **Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu memberikan gambaran melalui data dan fakta-fakta yang ada tentang upaya Indonesia dalam mewujudkan keamanan maritim pada masa pemerintahan Joko Widodo. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah pustaka dan interpretasi dari bahan yang terdapat dalam jurnal artikel lepas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data-data yang didapat kemudian dianalisa isinya demi mendukung permasalahan yang sedang diteliti dan data-data tersebut berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data teori dan konsep dari internet berupa jurnal

artikel yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan<sup>11</sup>.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Teori Pertahanan**

Beberapa pakar ilmu pertahanan memberikan defenisi tentang Ilmu Pertahanan. Menurut Brigjen (Purn) Makmur Supriyatno (2014) dalam bukunya “tentang Ilmu Pertahanan” menyatakan bahwa Ilmu pertahanan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang dan pada saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman militer dan non militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional<sup>12</sup>.

Sedangkan menurut Letjen (Purn) TNI Syarifudin Tippe, S.IP., M.Si. (2016) menyatakan bahwa Pertahanan dari sisi Ilmu Politik adalah sebuah konsep yang tak

---

Keamanan Laut Indonesia”, *Jurnal Indonesian Perspective*, Vol.3. No.1., Januari-Juni 2018, hlm.2.

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD*. ed.2. (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2013), hlm.291.

<sup>12</sup>Makmur Supriyanto, *Tentang Ilmu Pertahanan*. ed.1. (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor, 2014), hlm.7.

dapat dipisahkan dari suatu kehidupan. Pertahanan adalah kebutuhan esensial bagi sebuah entitas kehidupan. Bila tak mau dikuasai pihak lain, maka penting baginya untuk membangun pertahanan yang kuat. Sesungguhnya, pertahanan adalah seni untuk menjaga eksistensi, baik oleh pihak yang memiliki daya untuk melakukan itu atau pihak yang sekedar mengharapkan rasa aman dan damai<sup>13</sup>.

Jadi, pada dasarnya pertahanan merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) yang diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya dari ancaman yang muncul dari negara lain, actor maupun non state actor.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam konferensi pers sesaat setelah kegiatan Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2020 mengatakan bahwa kekuatan pertahanan adalah investasi negara yang perlu untuk

terus ditingkatkan. Saat ini, dirinya pun memandang sangat perlu untuk melakukan modernisasi dan investasi pertahanan<sup>14</sup>.

### **Teori Sea Power**

Alfred Thayer Mahan, seorang Perwira Tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat, dalam bukunya “*The Influence of Sea Power upon History*” mengemukakan teori bahwa *sea power* merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara, yang mana jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Sebaliknya, jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diabaikan akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut<sup>15</sup>.

Menurut Alfred Thayer Mahan ada enam elemen yang mempengaruhi *Sea Power* yaitu *geographical position* (posisi geografis), *Physical conformation, extent of territory* (luasnya wilayah), *number of population* (jumlah penduduk), *national*

---

<sup>13</sup>Syarifudin Tippe, *Syarifudin Tippe, Ilmu Pertahanan: Sejarah-Konsep-Teori Dan Implentasi*. ed.1. (Jakarta:Salemba Humanika, 2016), hlm.10.

<sup>14</sup>Yeremia Sukoyo, “Menhan Prabowo: Pertahanan Adalah Investasi”, dalam <https://www.beritasatu.com/faisal-maliki-baskoro/nasional/596754/menhan-prabowo->

pertahanan-adalah-investasi., 23 Januari 2020, diakses tanggal 11 November 2020.

<sup>15</sup>Indriata Hardiana, “Menuju Indonesia Sebagai Negara Poros Maritim”, dalam <https://setkab.go.id/menuju-indonesia-sebagai-negara-poros-maritim/>., 21 Oktober 2014, diakses tanggal 11 November 2020.

*character* (karakter bangsa) dan *character of government* (karakter pemerintahan)<sup>16</sup>.

Bung Karno dalam Pembukaan Munas Maritim tahun 1963 mengatakan “Kita satu persatu, seorang demi seorang harus mengetahui bahwa Indonesia, ia tidak bisa menjadi kuat, sentausa sejahtera, jikalau kita tidak menguasai samudra, jikalau kita tidak kembali menjadi bangsa samudera, jikalau kita tidak kembali menjadi bangsa bahari, bangsa pelaut sebagaimana kita kenal pada zaman bahari”<sup>17</sup>.

Didalam bukunya *Sea Power Indonesia* Dr. Marsetyo mengemukakan bahwa *Sea Power* dapat diartikan sebagai negara yang memiliki kekuatan Angkatan Laut yang memadai dan proporsional. *Sea Power* juga bermakna sebagai kemampuan suatu negara dalam menggunakan dan mengendalikan laut (*sea control*) serta mencegah lawan menggunakannya (*sea denial*)<sup>18</sup>.

Ada elemen-elemen penting *sea power* diantaranya posisi geografis, bentuk fisik, luasnya wilayah, jumlah penduduk, karakter bangsa dan karakter pemerintah. *Sea power* sebagai input adalah elemen-elemen kekuatan nasional di laut antara lain aparat penegak hukum, industri pertahanan maritim, sumber daya alam dan sumber daya manusia, sedangkan *sea power* sebagai output adalah suatu konsekuensi kemampuan untuk mengelola laut dan kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku dari state or non state baik di dan atau lewat laut<sup>19</sup>.

### **Teori Penegakan Hukum**

Menurut Lawrence M. Friedman dalam teorinya mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum

---

<sup>16</sup>Alfred Thayer Mahan, *The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783*. ed.1. (London:Cambridge University, 1889), hlm.16.

<sup>17</sup>Ardinanda Sinulingga, “Sea Power Penunjang Visi Maritim Indonesia”, dalam <http://maritimnews.com/2016/09/sea-power-penunjang-visi-maritim-indonesia/>, 28 September 2016, diakses tanggal 11 November 2020.

<sup>18</sup>DR. Marsetio, *Sea Power Indonesia*. ed.1. (Jakarta:Universitas Pertahanan, 2014), hlm.23.

<sup>19</sup>Mulyono Sri Hutomo, “Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio Paparkan Sea Power Indonesia Pada Kuliah Perdana Sekolah Pasca Sarjana UGM”, dalam <https://indomaritim.id/laksamana-tni-purn-prof-dr-marsetio-paparkan-sea-power-indonesia-pada-kuliah-perdana-sekolah-pasca-sarjana-ugm/>, 17 September 2019, diakses tanggal 11 November 2020.

menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat<sup>20</sup>.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>21</sup>.

Penegakan hukum bisa diartikan sebagai sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.

## **Teori Peran Angkatan Laut**

Peran Angkatan Laut memiliki andil yang besar untuk menjaga kedaulatan laut. Teori naval diplomacy Ken Booth dalam bukunya *Navies and Foreign Policy*<sup>22</sup> tentang trinitas fungsi angkatan laut adalah karya yang sangat signifikan sehingga telah banyak dipergunakan sebagai doktrin Angkatan Laut di berbagai negara. Menurut Booth, Angkatan Laut memiliki tiga fungsi yaitu fungsi militer, polisionil dan diplomasi<sup>23</sup>.

Menurut UU RI No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pada pasal 10 ayat 3 yang salah satu isinya berbunyi mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah dituntut untuk selalu siap menghadapi segala bentuk ancaman yang mengancam keutuhan serta kedaulatan negara. Setiap personel TNI harus memiliki kesiapan kesiagaan untuk diterjunkan pada setiap operasi, baik operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

---

<sup>20</sup>Faisal, "Tegaknya Hukum", dalam <https://medanposonline.com/opini/tegaknya-hukum/>, 28 Januari 2020, diakses tanggal 11 November 2020.

<sup>21</sup>Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), 3 Maret 2013, diakses tanggal 11 November 2020.

<sup>22</sup>Ken Booth, *Navies and Foreign Policy*. ed.1. (London:Routledge, 1977), hlm.36.

<sup>23</sup>Trio Sirmareza, "Naval Diplomacy Dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia Di United Nations Interim Force in Lebanon", *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol.3. No.1., Januari 2017, hlm.3.

Berdasarkan UU RI No.34 tahun 2004 tentang TNI pada pasal 4 ayat (1) berbunyi “TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima”, ini berarti bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) adalah bagian dari TNI yang mempunyai tugas berdasarkan UU RI No 34 tahun 2004 pasal 9, salah satu tugasnya adalah “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.

### **Konsep Negara Kepulauan**

Dikeluarkannya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang sering disebut konvensi PBB tentang hukum laut internasional yang dimana selanjutnya Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui UU RI No.17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut).

UNCLOS 1982 dan UU RI No.17 tahun 1985 mempunyai arti penting karena konsep negara kepulauan yang diperjuangkan Indonesia selama 25 tahun secara terus menerus berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat Internasional. UNCLOS adalah hasil dari konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak 1973 sampai 1982. Hingga kini tak kurang dari 158 negara yang telah menyatakan bergabung dengan Konvensi, termasuk Uni Eropa.

Pengakuan resmi secara internasional itu mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djakarta 13 Desember 1957 yaitu Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan tidak lagi sebatas klaim sepihak pemerintah Indonesia.

Negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan arang kering terluar kepulauan itu.

Termasuk dalam ketentuan Konvensi tersebut adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah perairan Natuna Utara. Kali ini kapal-kapal Cina berani kembali melakukan kegiatan eksploitasi tanpa izin di wilayah tersebut. Tidak hanya tanpa izin, namun juga bersikukuh pada klaim sepihaknya atas hak eksploitasi disana, klaim yang tidak diakui hingga saat ini oleh hukum internasional<sup>24</sup>

### **Konsep Keamanan Maritim**

Keamanan maritim merupakan sebagian kecil dari keamanan nasional, sehingga praktek keamanan nasional suatu negara menentukan bagaimana praktek & keamanan maritim dalam kebijakan nasional. Konsep keamanan maritim berada di antara kerangka keamanan tradisional dan non-tradisional. Berdasarkan kerangka keamanan tradisional, pelanggaran terhadap keamanan maritim dianggap mengancam kedaulatan dan identitas negara, sedangkan kerangka non-tradisional

cenderung memperluas bentang keamanan dari objek acuan sehingga masalah-masalah keamanan yang dikaji lebih dari sekedar ancaman terhadap kedaulatan dan identitas negara, seperti Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA), ekonomi, migrasi, lingkungan hidup, serta sumber daya<sup>25</sup>.

Christian Bueger menyatakan pendapatnya bahwa keamanan maritim mengandung empat konsep keamanan, yakni kekuatan laut atau kekuatan angkatan laut (*sea power*), keselamatan laut atau *marine safety*, ekonomi laut dalam atau *blue economy*, dan keamanan manusia atau *human security*. Konsep dari kekuatan laut menjelaskan tentang peran seluruh komponen kekuatan maritim nasional bersama kekuatan maritim lainnya yaitu melindungi keberlangsungan negara, melindungi jalur transportasi laut bagi perdagangan dan peningkatan ekonomi. Konsep keselamatan di laut menjelaskan keselamatan kapal dan instalasi laut dengan tujuan utamanya untuk melindungi

---

<sup>24</sup>Hukum Online, "Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional Untuk Kedaulatan Indonesia Di Natuna", dalam [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e16f5b67589c/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e16f5b67589c/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna?page=all#commento.)

[natuna?page=all#commento.](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e16f5b67589c/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna?page=all#commento.), 19 Januari 2020 diakses tanggal 11 Januari 2020.

<sup>25</sup>Muhammad Harry Riana Nugraha & Arfin Sudirman, "Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia", *Jurnal Wacana Politik*, Vol.1. No.2., Oktober 2016, hlm.178.

para profesional dan lingkungan laut. Keamanan maritim juga berkaitan dengan pembangunan di bidang ekonomi, dimana laut berperan sangat penting dalam perdagangan, dan perikanan. Laut mengandung sumber daya alam yang sangat penting, seperti minyak, dan bahan tambang dari dasar lautan. Pariwisata pantai juga menjadi sumber pendapatan ekonomi yang penting. Konsep keamanan manusia juga terkait dengan keamanan maritim, yang mengandung unsur-unsur seperti ketersediaan makanan, ketersediaan tempat tinggal, kehidupan berkelanjutan, dan tersedianya lowongan kerja yang aman<sup>26</sup>.

Keamanan Maritim (*Maritime Security*) adalah suatu kondisi lingkungan maritim yang bebas dari berbagai ancaman terhadap kedaulatan wilayah Indonesia dan penegakan hukum nasional dan internasional yang bertujuan menjamin terwujudnya kepentingan nasional Indonesia. Ancaman ini berupa ancaman kekerasan, ancaman terhadap sumber daya laut dan lingkungan, ancaman pelanggaran huku, dan ancaman bahaya navigasi.

---

<sup>26</sup>Christian Bueger, "What Is Maritime Security," *Jurnal Maritime*, Vol.1. No.1., Januari 2015, hlm.1–11.

Dengan karakter ancaman di laut yang kompleks dan dinamis, keamanan maritim memerlukan kontribusi semua komponen khususnya institusi penegak hukum. Ego sektoral harus dapat diminimalkan atau dihilangkan karena akan menghambat upaya kerja sama mewujudkan keamanan maritim. Keamanan Maritim mengandung lima esensi yaitu kepentingan nasional (aspek kedaulatan & hukum) di laut, penggunaan laut secara aman dan damai, penegakan hukum yang tidak hanya dibatasi oleh batasan teritorial fisik, peran aktif Indonesia dalam menjaga keamanan regional dan perlunya kerja sama komponen bangsa<sup>27</sup>.

Presiden Jokowi menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan focus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama, komitmen mendorong

---

<sup>27</sup>Prima Tegar Anugerah, "Kebijakan Dan Strategi Keamanan Maritim", *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol.1. No.1., Mei 2019, hlm.1.

pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama pada bidang kelautan serta Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim<sup>28</sup>.

Dalam mewujudkan poros maritim terdapat beberapa tantangan, salah satunya adalah mengubah paradigma lama dalam pembangunan yang menempatkan desa sebatas pusat eksploitasi sumber daya alam. Untuk menjadi sebuah negara maritim, maka infrastruktur antar pulau dan sepanjang pantai di setiap pulau merupakan hal yang harus dibangun dan dikembangkan. Jalan antar pulau ini harus benar-benar dapat direalisasikan untuk mempercepat transportasi antar pulau

### **Konsep Pembuat Keputusan (*The Decision Making*)**

Analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang

menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah Kebijakan<sup>29</sup>. Analisis kebijakan bukanlah sebuah keputusan, sebagaimana dikemukakan oleh Weimer and Vining “*The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision*”. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

*“Policy analysis is evaluable, because it can help a decision maker by providing information through research and analysis, isolating and clarifying issues, revealing inconsistencies in aims, and effort, generating new alternative and suggesting ways of translating ideas into*

---

<sup>28</sup>Frandi Kuncoro, “Membangun Kekuatan Nasional Dengan Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia”, *Jurnal Pertahanan*, Vol.5. No.2., Agustus 2015, hlm.175.

<sup>29</sup>Muhadjir Darwin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. ed.2. (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1994), hlm.71.

*feasible and realizable policies. Its major contribution may be to yield insight particularly with regard to the dominance and sensitivity of the parameters. It is no more than adjunct, although a powerful one, to the judgment, intuition, and experience of decision makers”<sup>30</sup>.*

Menurut Quade, analisis kebijakan publik diartikan sebagai sebuah penelitian terapan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sosial guna mendapatkan pemecahan masalah yang lebih baik. Kemudian Stuart S. Nagel menambahkan bahwa analisis kebijakan publik adalah penentuan dalam rangka hubungan antara alternatif kebijakan dan tujuan kebijakan.

Analisis kebijakan merupakan suatu hal penting karena bisa membantu seorang pembuat keputusan dengan memberikan informasi yang diperoleh melalui penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan mengungkap ketidakcocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatif-alternatif baru dan mengusulkan cara-cara menterjemahkan ide-ide kedalam kebijakan-kebijakan yang

mudah diwujudkan dan direalisasikan. Kontribusi utamanya barangkali untuk memberikan masukan-masukan terutama dengan memperhitungkan keutamaan dan kepekaan parameternya<sup>31</sup>.

Dalam upayanya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim, Pemerintahan Jokowi mengeluarkan beberapa kebijakan yang ditujukan untuk menciptakan keamanan maritim terlebih dahulu

### **Hasil Penelitian**

Merujuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Tahun 2020-2024. Pemerintahan Joko Widodo melakukan upaya-upaya yang secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan yaitu pendekatan keras (hard effort) dengan penguatan penegakan pertahanan, keamanan dan keselamatan maritim dalam menjaga wilayah dan sumberdaya laut serta pendekatan lunak (soft effort)

---

<sup>30</sup>E S Quade, *Analysis For Public Decisions*.ed.2. (New York:North Holland, 1982), hlm.11.

<sup>31</sup>Kismartini, *Analisis Kebijakan Publik (Kerangka Dasar)*. ed.1. (Semarang:Undip Press, 2019), hlm.8.

dengan penguatan diplomasi dan perundingan maritim. Kedua upaya tersebut untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

### **Pendekatan Keras (Hard Effort)**

Di dalam pendekatan keras (*hard effort*) dengan penguatan penegakan pertahanan, keamanan dan keselamatan maritim dalam menjaga wilayah dan sumberdaya laut, perlu adanya unsur yang terbagi kedalam tiga elemen. Tiga elemen ini yang secara urut harus dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam ide terwujudnya Poros Maritim Dunia agar dapat menghadapi isu keamanan maritim dengan baik. Pertama, pemerintah harus lebih dulu menciptakan doktrin maritim sebagai dasar pembuatan kebijakan. Selanjutnya, pemerintah harus membangun Maritime Domain Awareness (MDA) sebagai wawasan bagi setiap elemen negara agar bersinergi mendukung pemerintah. Terakhir, setelah kedua elemen tersebut terpenuhi, pemerintah bisa mulai berfokus dalam membangun *sea power* sebagai instrumen dalam menghadapi isu keamanan maritim<sup>32</sup>.

### **Doktrin Maritim sebagai dasar pembuatan kebijakan (Konsensus)**

Ketika Jokowi pertama kali membicarakan ide Poros Maritim Dunia dihadapan para pemimpin negara lain yang hadir dalam KTT Asia Timur (*East Asia Summit/EAS*) di Naypitaw, Myanmar, pada bulan November 2014, banyak pihak yang menganggap bahwa Jokowi telah melontarkan penjabaran tentang Doktrin Maritim Indonesia. Hal ini tidak tepat karena sebenarnya yang dijabarkan oleh Jokowi di EAS baru merupakan gambaran mengenai lima misi yang diusung oleh Jokowi yang bermuara kepada visi menjadikan Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang terkemuka dalam bidang maritim. Dengan demikian, diperlukan penjelasan mengenai apa disebut dengan Doktrin Maritim dan kaitannya dengan keamanan maritim. jika nanti terwujud, Doktrin Maritim Indonesia harus memuat penjelasan dan gambaran komprehensif mengenai bagaimana Indonesia seharusnya menyiapkan diri dalam masa damai maupun perang, khususnya dalam isu keamanan maritim.

---

<sup>32</sup>Muhammad Edrian, "Melihat Keamanan Maritim Indonesia", *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol.2. No.1., Juni 2017, hlm.17.

Doktrin ini akan menjelaskan posisi TNI AL sebagai garda terdepan dalam menghadapi isu keamanan maritim serta perannya dalam kebijakan maritim pemerintah guna mensinergikan dengan lembaga kemaritiman lain yang ada. Doktrin ini juga akan menggariskan bagaimana peran dan kontribusi TNI AL dalam negara secara menyeluruh dan bersama-sama elemen lain dalam melindungi kepentingan nasional Indonesia. Disamping itu doktrin maritim juga menjelaskan bentuk peran aktif TNI AL serta lembaga kemaritiman lain dalam membangun kekuatan maritim di Indonesia menuju negara maritim yang besar.

### **Memahami Laut Melalui Maritim Domain Awareness (MDA)**

Salah satu kebijakan dan inisiatif TNI AL adalah mengaktualisasikan pembangunan kesadaran maritim (*Maritime Domain Awareness / MDA*). Bila dilihat dari konstelasi geografis Indonesia dan perkembangan lingkungan strategis saat ini di mana negara – negara maju terus mengembangkan ekonominya melalui sektor kelautan, maka TNI Angkatan Laut melalui program ini berupaya membangun kesadaran maritim bangsa Indonesia yang

diimplementasikan dengan pembangunan alutsista produksi dalam negeri seperti rencana pembangunan kapal selam dan kapal kombatan di dalam negeri sebagai salah satu upaya peningkatan kesadaran maritim dari berbagai aspek. Ditinjau dari aspek teknologi, dibangunnya kapal selam tersebut dapat mendorong usaha industri dan jasa maritim menuju kemandirian alutsista melalui ToT (*Transfer of Technology*), dari aspek politik dapat memberikan efek penangkalan (*deterrence effect*) dan posisi tawar (*bargaining position*) di kawasan regional maupun internasional, dari aspek pertahanan keamanan dapat menjamin tegaknya kedaulatan di seluruh wilayah laut dan laut yurisdiksi nasional, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepada aspek ekonomi karena dapat memberikan kontribusi yang besar kepada negara untuk kemakmuran masyarakat Indonesia karena terjaminnya keamanan nasional (*national security*) dan dari aspek social budaya yang dapat memberikan rasa bangga bagi bangsa Indonesia yang memandang laut sebagai alat pemersatu dan kesejahteraan bangsa. Dalam program pembangunan kemandirian alutsista, akan banyak instansi

– instansi terkait dan industri – industri swasta maupun pemerintah yang ikut terlibat dalam program menuju kemandirian alutsista, hal ini sebagai konsekuensi logis, karena adanya penilaian yang bersifat sangat strategis sekaligus dapat membuka peluang bisnis dan investasi bagi industri galangan kapal nasional maupun swasta. Dengan banyaknya peluang bisnis akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan sektor maritim, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran maritim yang semakin merata<sup>33</sup>

### **Membangun Sea Power Mulai Dari Militer**

*Sea power* tidak hanya terbatas pada kekuatan Angkatan Laut (*naval power*) saja, tetapi *sea power* juga mencakup seluruh komponen kekuatan maritim nasional, yang memiliki arti lebih luas terkait dengan kontrol terhadap perdagangan dan perekonomian internasional melalui laut, penggunaan dan kontrol terhadap sumber daya laut, penggunaan kekuatan Angkatan laut dan perekonomian maritim sebagai instrumen diplomasi, penangkalan dan

---

<sup>33</sup>Prima Tegar Anugerah, “Maritime Domain Awareness Concept”, *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol.2. No.1., November 2017, hlm.7-8.

pengaruh politik pada masa damai serta pengoperasian Angkatan Laut pada masa perang. Dengan demikian, *sea power* bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merupakan hal yang sangat penting, di mana elemen – elemen *sea power* akan menjadi modal dalam membangun dan pendayagunaan kekuatan maritim nasional. Terkait dengan strategi pengamanan di era globalisasi, terutama oleh TNI Angkatan Laut, maka dari elemen *sea power*, kita fokus pada sumber daya manusia, sumber daya alam serta *interest* pemerintah<sup>34</sup>

### **Pendekatan Lunak (Soft Effort)**

Generasi muda harus diekspos dengan masalah kemaritiman sejak dini melalui pendidikan. Dengan demikian, akan ada *sense of ownership* untuk menjadikan Indonesia negara maritim. Setelah melakukan pendekatan keras (*hard effort*) seperti terwujudnya doktrin maritim, *Maritime Domain Awareness* dan *Sea Power*, Pemerintah Joko Widodo juga melakukan pendekatan lunak (*soft effort*).

<sup>34</sup>Prima Tegar Anugerah, “Sea Power Security Good Order at Sea”, *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol.4. No.1., Desember 2017, hlm.7.

1. Memperkuat Upaya Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim adalah negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih mengenai batas laut, kerjasama maritim serta pertahanan.

2. Berperan aktif di ASEAN dan IORA serta IOM

Diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia di kawasan mengintegrasikan dua pendekatan diplomasi maritim. Pertama, upaya diplomasi dalam bentuk *soft maritime diplomacy* melalui kerja sama dan persuasi diantaranya melaksanakan kerjasama, persuasi, dan koersif di tingkat negara yang tergabung dalam negara ASEAN termasuk melalui *ASEAN Maritime Forum (AMF)* dan *Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF)* selain itu juga melalui organisasi regional di wilayah Samudera Hindia yang bernama *Indian Ocean Rim Association (IORA)* dan juga melalui antar pemerintah terkemuka dalam bidang migrasi yang bekerja erat dengan mitra pemerintah, organisasi antar pemerintah, dan non pemerintah yang bernama *International Organization for Migration (IOM)*.

## Kesimpulan

Pendekatan keras (*hard effort*) dalam penanganan keamanan maritim membangun Poros Maritim Dunia masih belum dapat dikatakan ideal karena Jokowi terlalu memperhatikan aspek ekonomi dan masih belum lengkapnya elemen-elemen pendukung kebijakan maritim Indonesia. Mengingat keamanan maritim sebagai parameter keberhasilan dari sebuah pemerintahan negara yang berorientasi pada maritim, maka sudah sepatutnya Jokowi lebih menekankan fokus Poros Maritim Dunia kepada isu keamanan maritim yang dapat dimulai secara bertahap mulai dari penetapan sebuah Doktrin Maritim, pembentukan MDA, dan pembangunan kekuatan militer (*Sea power*) yang masih kurang. Jalan dan proses Indonesia menuju negara maritim yang kuat dan terpadang memang tidak mudah, tetapi hal tersebut dapat dilalui jika Indonesia dapat menjaga stabilitas keamanan perairannya dan wilayah perairan di sekitarnya dimana hal tersebut didukung oleh kebijakan maritim yang strategis. Pada Pendekatan Lunak (*soft effort*) dengan upaya diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia untuk

mewujudkan visinya menjadi Poros Maritim Dunia yang diimplementasikan melalui kerja sama, persuasi, dan koersif harus lebih ditingkatkan lagi.

Namun demikian, pendekatan *hard* yang dilakukan oleh Indonesia harus hati-hati. Sebab, pendekatan *hard* dapat berpotensi menjadi sandungan dalam mencapai kepentingan yang berusaha dipromosikan melalui upaya-upaya kerja sama dan persuasi (*soft*). Keaktifan Indonesia menyampaikan gagasan, usulan, rekomendasi, dan lainnya di berbagai forum dan kesempatan di level bilateral, trilateral, maupun multilateral menunjukkan betapa Indonesia berusaha menegaskan kepentingannya terhadap aspek maritim. Namun pada saat yang bersamaan, sikap agresif Indonesia di laut teritorialnya melalui kebijakan membakar dan menenggelamkan kapal asing bisa mengusik hubungan baik Indonesia yang berusaha dibangun dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, artikel ini ditunjukkan terkait upaya diplomasi maritim melalui kerja sama, persuasi, dan koersi yang

menunjukkan bahwa domain dari diplomasi maritim melibatkan berbagai elemen negara dan lembaga pemerintahan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi maritim Indonesia dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai cara dan dengan melibatkan berbagai aktor menuju pada satu visi dan cita-cita sebagai poros maritim dunia. Temuan penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian diplomasi maritim, memperkaya khazanah kajian politik luar negeri Indonesia serta kajian kawasan Asia Tenggara dan ASEAN<sup>35</sup>

#### Daftar Pustaka

- Al Syahrin, M. N. 2018."Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia". *Jurnal Indonesian Perspective*, Vol.3. No.1. Januari-Juni.
- Anugerah, P. T. 2017."Maritime Domain Awareness Concept". *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol.2. No.1. November.
- Anugerah, P. T. 2017."Maritime Security and Maritime Power Concept". *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol.4. No.1. Oktober.
- Anugerah, P. T. 2017."Sea Power Security Good Order at Sea". *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol.4. No.1. Desember.
- Anugerah, P. T. 2019."Kebijakan dan

---

<sup>35</sup>Najamuddin sKhairur Rijal, "Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju

Poros Maritim Dunia", *Jurnal Global & Strategis*, Vol.13. No.1., Juni 2019, hlm.13.

- Strategi Keamanan Maritim". *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol.1. No.1. Mei.
- Sinulingga,A."Sea Power Penunjang Visi Maritim Indonesia", dalam <http://maritimnews.com/2016/09/sea-power-penunjang-visi-maritim-indonesia/>, 28 September 2016 diakses tanggal 11 November 2020.
- Booth, K. (1977). *Navies and Foreign Policy*. (ed.1). London:Routledge.
- Bueger, C. 2015."What is maritime security". *Jurnal Maritime*, Vol.1. No.1. Januari.
- Edrian, M. 2017."Melihat Keamanan Maritim Indonesia". *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol.2. No.1. Juni.
- Faisal."Tegaknya Hukum", dalam <https://medanposonline.com/opini/tegaknya-hukum/>, 23 Januari 2020 diakses tanggal 11 November 2020.
- Hardiana,I."Menuju Indonesia sebagai Negara Poros Maritim", dalam <https://setkab.go.id/menuju-indonesia-sebagai-negara-poros-maritim/>, 21 Oktober 2014 diakses tanggal 11 November 2020.
- Asshiddiqie,J." Penegakan Hukum", dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), 3 Maret 2013 diakses tanggal 11 November 2020.
- Perdagangan,K. 2014."Laporan Akhir Analisis Kebijakan Impor Ikan dan Produk Perikanan". *Jurnal Maritim*, Vol.1. No.1. September.
- Kismartini. (2019). *Analisis Kebijakan Publik (Kerangka Dasar)*. (ed.1). Semarang:Undip Press.
- Kuncoro, F. 2015."Membangun Kekuatan Nasional Dengan Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia". *Jurnal Pertahanan*, Vol.5. No.2. Agustus.
- Mahan, A. T. (1889). *The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783*. (ed.1). London:Cambridge University.
- Marsetio, D. (2014). *Sea Power Indonesia*. (ed.1). Jakarta:Universitas Pertahanan.
- Hutomo,M.S." Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio Paparkan Sea Power Indonesia Pada Kuliah Perdana Sekolah Pasca Sarjana UGM", dalam <https://indomaritim.id/laksamana-tni-purn-prof-dr-marsetio-paparkan-sea-power-indonesia-pada-kuliah-perdana-sekolah-pasca-sarjana-ugm/>, 17 September 2019 diakses tanggal 11 November 2020.
- Nugraha, M. H. R., & Sudirman, A. 2016."Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia". *Jurnal Wacana Politik*, Vol.1. No.2. 1(2). Oktober.
- Prahenti, D. S. 2013."Dampak Singgahnya Pencari Suaka Ke Australia Terhadap Ancaman Keamanan Non-Tradisional Bagi Indonesia". *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*, Vol.1. No.1. Desember.
- Rijal, N. K. 2019."Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia". *Jurnal Global & Strategis*, Vol.13. No.1. Juni.
- Rustam, I. 2016." Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia". *Jurnal Indonesian Perspective*, Vol.1. No.1.Januari-Juni.
- Setiawan, I. 2016."Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana

Indonesia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.4. No.1. Oktober.

Sirmareza, T. 2017." Naval Diplomacy dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia di United Nations Interim Force in Lebanon". *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol.3. No.1. Januari.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. (ed.2). Bandung:Penerbit Alfabeta.

Supriyanto, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. (ed.1). Jakarta:Yayasan Pustaka Obor.

Tippe, S. (2016). *Syarifudin Tippe, Ilmu Pertahanan: Sejarah-Konsep-Teori dan Implentasi*. (ed.1). Jakarta:Salemba Humanika.

Widyoutomo, A. 2020."Pengamanan laut mewujudkan keamanan maritim Indonesia". *Jurnal Maritim*, Vol.1. No.1. 1(1), Februari.

Sukoyo,Y." Menhan Prabowo: Pertahanan adalah Investasi", dalam <https://www.beritasatu.com/faisal-maliki-baskoro/nasional/596754/menhan-prabowo-pertahanan-adalah-investasi>, 23 Januari 2020 diakses tanggal 11 November 2020.

Darwin, M. (1994). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (ed.2). Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Quade, E. S. (1982). *Analysis For Public Decisions*. (ed.2). New York:North Holland.